

SKRIPSI

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JANGKANG DUA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA



Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

Zamzuri

NIM. E1031171030

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024**

SKRIPSI

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JANGKANG DUA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Oleh :

**ZAMZURI
NIM. E1031171030**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2024**

LEMBARAN PERSETUJUAN

**PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JANGKANG DUA
KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA**

Tanggungjawab Yuridis Pada:

ZAMZURI
NIM. E1031171030

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. Martoyo, MA
NIP. 196010031986031004

Tanggal :

Dosen Pembimbing Kedua,



Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP. 198306272006042020

Tanggal :

HALAMAN PENGESAHAN

PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA JANGKANG DUA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA

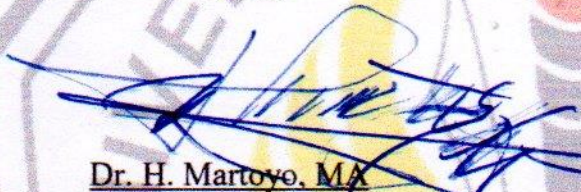
Oleh:
ZAMZURI
NIM. E1031171030

Dipertahankan di : Pontianak
Pada Hari/Tanggal : Selasa, 30 Juli 2024
Waktu : 09.00 – Selesai.
Tempat : Ruang Sidang Skripsi

Tim Penguji

Ketua,

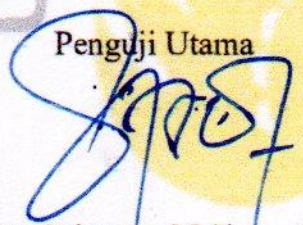
Sekretaris

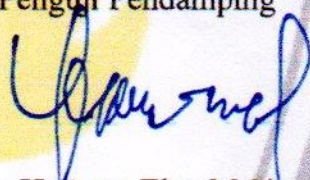

Dr. H. Martoyo, MA
NIP. 196010031986031004


Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si
NIP. 198306272006042020

Penguji Utama

Penguji Pendamping


Drs. Sukamto, M.Si
NIP. 196010081987031002


Drs. H. Agus Eka, M.Si
NIP. 19630123198810001

DISAHKAN OLEH:

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



Dr. Herlan, S.Sos, M.Si
NIP. 197205212006041001

ABSTRAK

Zamzuri, Judul: Peran Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. **Skripsi: Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak 2024.**

Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa sebagai penentu arah, komunikator, dan integrator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa, di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan jensi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Kepala Desa Jangkang Dua belum maksimal menjalankan perannya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Hal tersebut dapat dilihat peran kepala desa sebagai penentu arah, di mana kepala desa belum mampu menetapkan visi dan misi yang jelas dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat desa. Sebagai komunikator yaitu informasi yang disampaikan terkait program dan rencana pembangunan desa tidak selalu sampai ke seluruh lapisan masyarakat. Sebagai integrator, karena, lemahnya koordinasi antara lembaga dan kelompok masyarakat desa menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan program. Bertolak dari simpulan tersebut, maka dikemukakan saran-saran sebagai berikut: agar kepemimpinan Kepala Desa Jangkang Dua dapat menjalankan perannya secara maksimal, maka kepala desa harus bekerja sama dengan masyarakat untuk menetapkan visi dan misi yang jelas dan dapat diikuti oleh semua pihak.

Kata kunci: Peran, Kepemimpinan, Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat.

ABSTRACT

Zamzuri, Judul: *The Role of Village Head's Leadership to Increase Community Participation in Development Planning Meetings in Jangkang Dua Village, Kubu Subdistrict, Kubu Raya Regency*. **Thesis: Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2024.**

This study aims to describe and analyze the role of the Village Head's leadership as a direction setter, communicator, and integrator in increasing community participation in the village development planning meetings (Musrenbang) in Jangkang Dua Village, Kubu Subdistrict, Kubu Raya Regency. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. The results of this study show that the leadership of the Village Head of Jangkang Dua has not fully succeeded in increasing community participation in the village's development planning meetings. These results can be seen in his role as a direction setter, where the village head has not been able to establish a clear vision and mission that all villagers can understand. As a communicator, the information about village programs and development plans does not consistently reach all community levels. As an integrator, weak coordination between village institutions and community groups causes inefficiency in the execution of programs. Based on these conclusions, the following recommendations are proposed: the Village Head of Jangkang Dua should fully carry out his leadership role, and he needs to collaborate with the community to establish a clear vision and mission that everyone can follow.

Keywords: *Role, Leadership, Village Head, Community Participation.*



RINGKASAN SKRIPSI

Penelitian ini berjudul: Peran Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya. Permasalahan yang diangkat bersumber pada kurangnya komunikasi yang baik antara kepala desa dengan masyarakat terkait perencanaan pembangunan atau musrenbang-desa dan masih terdapat adanya program kegiatan pembangunan yang belum terealisasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis peran kepemimpinan kepala desa sebagai penentu arah, komunikator, dan integrator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa, di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian terdiri dari: Kepala Desa, Ketua BPD, Kepala Dusun, Tokoh Masyarakat dan masyarakat Desa Jangkang Dua.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Kepemimpinan Kepala Desa Jangkang Dua belum dapat menjalankan perannya sebagai penentu arah secara maksimal. Karena kepala desa belum mampu menetapkan visi dan misi yang jelas dan dapat dipahami oleh seluruh masyarakat desa dan tidak ada strategi yang jelas dan terstruktur untuk mengimplementasikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. 2) Sebagai komunikator, yang mana informasi yang disampaikan terkait program dan rencana pembangunan desa tidak selalu sampai ke seluruh lapisan masyarakat dan kepala desa lebih sering menggunakan saluran komunikasi tradisional seperti pertemuan langsung, yang tidak selalu dapat dihadiri oleh semua warga.

3) Sebagai integrator. Karena, lemahnya koordinasi antara lembaga dan kelompok masyarakat desa menyebabkan ketidakefektifan dalam pelaksanaan program dan tidak semua kelompok masyarakat desa terlibat aktif, sehingga aspirasi mereka tidak terakomodasi dengan baik. Kemudian, kurang mendalamnya proses pengumpulan data, sehingga menyebabkan rencana pembangunan desa tidak mencerminkan kebutuhan seluruh masyarakat Desa Jangkang Dua.

Bertolak dari simpulan tersebut, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut: Agar kepemimpinan Kepala Desa Jangkang Dua dapat menjalankan perannya sebagai penentu arah secara maksimal, maka kepala desa harus bekerja sama dengan masyarakat untuk menetapkan visi dan misi yang jelas dan dapat diikuti oleh semua pihak. Agar kepemimpinan Kepala Desa Jangkang Dua dapat menjalankan perannya sebagai komunikator secara maksimal, maka gunakan berbagai saluran komunikasi, termasuk media sosial, aplikasi pesan singkat, dan papan pengumuman di tempat strategis. Agar kepemimpinan Kepala Desa Jangkang Dua dapat menjalankan perannya sebagai integrator secara maksimal, maka perlu dibentuk tim koordinasi yang terdiri dari perwakilan berbagai lembaga desa, kelompok masyarakat, dan tokoh adat untuk memastikan semua program pembangunan desa selaras dan sinergis.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : ZAMZURI

Nomor Mahasiswa : E1031171030

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Juli 2024
Yang membuat Pernyataan



ZAMZURI
NIM:E1031171030

HALAMAN MOTTO

MOTTO

“Seorang Pemimpin adalah Seseorang yang Mengetahui Jalannya, Menempuh Jalannya, Dan Menunjukkan Jalannya Kepada Orang Lain.”

(John C. Maxwell)

“Kepemimpinan adalah tentang melakukan hal yang benar, bukan hanya melakukan sesuatu dengan benar.”

(Peter Drucker)

“Jika pemimpin dapat dikatakan berperan apabila dapat menghadirkan solusi yang efektif dan membawa perubahan positif.”

(Zamzuri)

HALAMAN PERSEMBAHAN

PERSEMBAHAN:

Segala Puji bagi Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Karya sederhana ini ku persembahkan untuk:

Kedua Orang Tuaku,

SARWADI dan WAGIYEM

Yang selalu memberikan cinta, dukungan, dan doa tanpa henti. Kalian adalah sumber inspirasi dan kekuatan saya.

Beserta Saudara kandungku,

- 1. SUYUTI**
- 2. YAHSYA**
- 3. RUBANGI**

Yang selalu memberikan semangat, tawa, dan kebersamaan yang tiada tara.

1. Para Dosen,
Yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang berharga selama masa pendidikan saya.
2. Teman-Teman Terbaik,
Yang selalu mendukung, berbagi suka dan duka, serta memberikan kenangan indah sepanjang perjalanan ini.
3. Semua Pihak yang Telah Membantu,
Yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, namun kontribusi dan kebaikannya sangat berarti dalam proses penyusunan karya ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu wujud bakti saya kepada kalian semua, Dengan penuh rasa hormat dan cinta,

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Peran Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya”.

Penulis menyadari, bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari Segarau Parit, baik dalam penyusunan kalimat maupun dalam penggunaan kata-kata. Sehubungan dengan itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya konstruktif agar kekurangan dan kelemahan dapat diatasi. Penulisan skripsi ini, penulis telah banyak memperoleh bantuan baik moril maupun materiil dari bapak Prof. Dr. H. Martoyo, MA, selaku Dosen pembimbing utama dan ibu Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si, selaku Dosen pembimbing kedua yang telah banyak memberikan masukan sehingga terselesainya laporan penulisan skripsi ini. Di samping perkenankanlah penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada:

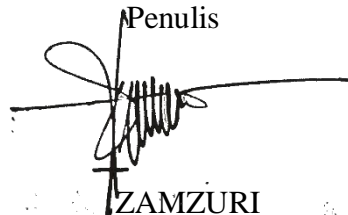
1. Dr. Herlan, S.Sos, M.Si, Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Drs. Sukamto, M.Si, selaku Dosen penguji utama yang telah banyak memberikan masukan sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan
3. Drs. H. Agus Eka, M.Si, selaku Dosen penguji kedua yang juga banyak memberikan masukan sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan.
4. Hamdani selaku Kepala Desa Jangka Dua beserta staf yang telah banyak memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan masalah Peran Kepemimpinan Kepala Desa untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya.

Pontianak, Juli 2024

Penulis



ZAMZURI
NIM.E1031171030

DAFTAR ISI

	Halaman
Bagian Awal	i
Sampul Dalam	ii
Halaman Persetujuan	iii
Abstrak	iv
Abstract	v
Ringkasan Skripsi	vi
Pernyataan Keaslian	viii
Halaman Moto	ix
Halaman Persembahan	x
Kata Pengantar	xi
Daftar Isi	xiii
Daftar Tabel	xv
Daftar Gambar	xvi

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Permasalahan	13
1.3. Fokus Penelitian	13
1.4. Rumusan Masalah	13
1.5. Tujuan Penelitian	14
1.6. Manfaat Penelitian	14

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

2.1 Teori	15
2.2 Konsep Partisipasi Masyarakat	21
2.3 Hasil Penelitian yang Relevan	27
2.4 Alur Pikir Penelitian	30
2.5 Pertanyaan Penelitian	34

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	35
3.2 Langkah-Langkah Penelitian	35
3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.4 Subjek dan Objek Penelitian	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Instrumen atau Alat Pengumpulan Data	42
3.7 Analisis Data	42
3.7.1 Teknik Keabsahan Data	43
3.7.2 Teknik Analisis Data	44

**BAB IV. GAMBAR UMUM DESA JANGKANG DUA KECAMATAN
KUBU KABUPATEN KUBU RAYA**

4.1 Keadaan Geografis	46
4.2 Keadaan Monografis	48
4.2 Pemerintah Desa Jangkang Dua	56
4.2 Pembagaan Tugas dan Wewenang	59
4.2 Perekonomian Desa	62

**BAB V. PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA DESA UNTUK
MENINGKATKAN PARTISIPASI DALAM MUSYAWARAH
PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN, DI DESA JANGKANG
DUA KECAMATAN KUBU KABUPATEN KUBU RAYA**

5.1. Penentu Arah.....	65
5.2 Komunikator	73
5.3 Integrator.....	81

BAB VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan	90
6.2 Saran	91

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Bio data Penulis
3. Dokumentasi

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Daftar Kehadiran Peserta Musrenbang Desa di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya	8
1.2 Rencana Kerja Pembangunan Desa Jangkang Dua Tahun 2023	10
1.3 Data kelembagaan Desa Jangkang Tahun 2023	12
3.1 Jadwal Penulisan Penelitian Skripsi Pelaksanaan Waktu Penelitian	38
4.1 Tata Guna Tanah di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Tahun 2023	47
4.2 Keadaan Penduduk Desa Jangkang Dua Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2023	49
4.3 Keadaan Penduduk Desa Jangkang Dua Menurut Suku Bangsa Tahun 2023	50
4.4 Komposisi Penduduk Desa Jangkang Dua Menurut Agama dan Kepercayaan Tahun 2023	51
4.5 Sarana dan Prasarana Peribadatan Desa Jangkang Dua Tahun 2023	52
4.6 Komposisi Penduduk Desa Jangkang Dua Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2023	53
4.7 Sarana dan Prasarana Pendidikan di Desa Jangkang Dua Tahun 2023	55
4.8 Jenis Mata Pencaharian Penduduk Desa Jangkang Dua Tahun 2023	56
4.9 Sember Penerimaan Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Tahun 2021-2023	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Alur Pikir Penelitian	33
4.1 Struktur Organisasi dan Pemerintah Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya	59

BAB I

PENDAHULAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan juga peningkatan daya saing daerah, dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintah daerah perlu ditingkatkan dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan pesaing global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Otonomi desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, menyebutkan desa dapat membuat kebijakan tentang desa dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

Kepala desa sebagai administrator pembangunan yang salah satu perannya adalah menggerakkan pembangunan dalam masyarakat, pembangunan ini harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak

dari bawah (*bottom up*), mengikutsertakan masyarakat secara aktif, dan dilaksanakan bersama masyarakat, demi terciptanya kehidupan kedamaian dan kesejahteraan dalam masyarakat. Pemerintah desa seharusnya mempunyai peranan yang sangat penting terhadap akselerasi (percepatan pelaksanaan implementasi) dari berbagai tahapan pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Kepala Desa memiliki tugas dan wewenang antara lain; menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan tugasnya ini, Kepala Desa memiliki wewenang, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
3. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. Menetapkan Peraturan Desa
5. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. Membina kehidupan masyarakat Desa
7. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
9. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
12. Memanfaatkan teknologi tepat guna
13. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
14. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
15. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dari seluruh aspeknya, tidak akan dapat berjalan secara optimal, bilamana pemerintah desa (Kepala Desa) sebagai

orang yang terdepan dengan mewakili kewenangan untuk menggerakkan masyarakat bersifat apatis atau tidak peduli terhadap kondisi masyarakatnya dan pemerintahannya. Untuk menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya diperlukan adanya tenaga atau unsur penggerak yang mampu menggerakkan dan mengarahkan kemampuan masyarakat untuk dapat mewujudkan cita-cita pembangunan, dalam hubungan ini maka Kepala Desa memegang peranan yang menentukan. Sebagai pemimpin tertinggi dan penanggung jawab pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan,

Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya melalui konsultasi publik atau musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Musrenbang merupakan forum konsultasi para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kesepakatan perencanaan pembangunan di daerah yang bersangkutan sesuai tingkatan wilayahnya. Penyelenggaraan musrenbang meliputi tahap persiapan diskusi dan perumusan prioritas program atau kegiatan, formulasi kesepakatan musyawarah dan kegiatan pasca musrenbang. Dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan. Sesuai Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Perencanaan Desa memuat definisi tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dalam ketentuan pasal 1 angka 7 yang berbunyi Musawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau disebut dengan nama lain Musrenbang Desa adalah Musyawarah antar Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur

masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota.

Berdasarkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014, dalam rangka perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pemerintah Desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) adalah dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimuktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

Rancangan Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa dan disusun melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan atau biasa disebut dengan Musrenbang Desa. Dokumen RKP Desa kemudian menjadi masukan penyusunan dokumen APB Desa dengan sumber anggaran dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli Desa (PADesa), swadaya dan partisipasi masyarakat, serta sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat. Proses penyusunan dokumen RKP Desa dapat dibagi dalam tiga tahapan. Tahapan

Pertama adalah persiapan Musrenbang Desa, merupakan kegiatan mengkaji ulang dokumen RPJM Desa, mengkaji ulang dokumen RKP Desa tahun sebelumnya, melakukan analisa data dan memverifikasi data ke lapangan bila diperlukan. Tahapan Kedua adalah forum pertemuan warga dan berbagai pemangku kepentingan untuk memaparkan hasil analisis keadaan darurat/kerawanan desa, membahas draft RKP Desa, menyepakati kegiatan prioritas termasuk alokasi anggarannya. Setelah musrenbang, dilakukan kegiatan merevisi RKP Desa berdasarkan masukan dan kesepakatan, kemudian dilakukan penetapan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Tahapan Ketiga adalah tahap sosialisasi merupakan sosialisasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan. Dokumen RKP Desa selanjutnya akan menjadi bahan bagi penyusunan APB Desa. RKP Desa dan APB Desa (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) wajib dipublikasikan agar masyarakat dapat terlibat dalam kegiatan dan melakukan pengawasan partisipatif terhadap pelaksanaannya.

Penyusunan RPJM Desa memuat visi dan misi Kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam pasal 7 Kepala Desa menyelenggarakan penyusunan RPJM Desa dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Desa. Penyusunan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas program dan kegiatan. Permendagri nomor 114 pasal 8 juga mengatur tentang bagaimana cara

Pembentukan Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau RPJMDes atau RPJM Desa, yaitu Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, dengan tujuan melaksanakan kegiatan penyelarasan arah kebijakan pembangunan, pengkajian keadaan Desa, penyusunan rancangan RPJM Desa dan penyempurnaan rancangan RPJM Desa.

Tujuan Musrenbang Desa adalah menyusun prioritas kebutuhan atau masalah yang akan dijadikan kegiatan penyusunan RKP Desa dengan pemilahan sebagai berikut; Prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan desa sendiri dan dibiayai oleh APB Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PA Desa), Alokasi Dana Desa (ADD), dana swadaya desa/masyarakat, dan sumber lain yang tidak mengikat, dan Prioritas kegiatan kegiatan desa yang dilaksanakan desa sendiri yang dibiayai oleh APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN. Menyiapkan prioritas masalah daerah yang ada di desa yang akan diusulkan melalui musrenbang kecamatan untuk menjadi kegiatan pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD); Menyepakati Tim Delegasi Desa yang akan memaparkan persoalan daerah yang ada di desanya pada forum musrenbang kecamatan untuk penyusunan program pemerintah daerah (UPTD dan atau SKPD) tahun berikutnya.

Peran serta masyarakat dan partisipasinya dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemerintah desa dari seluruh aspeknya, termasuk partisipasi dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa sangat penting karena dalam musrenbang masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, kemudian masyarakat dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang sering mereka hadapi sehingga dapat menjadi pertimbangan dan masukan untuk

dapat membawa manfaat yang optimal bagi peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam musyawarah perencanaan pembangunan maka akan lebih banyak ide dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat untuk menjadi masukan dan pertimbangan pemerintah desa dalam menentukan prioritas program kegiatan desa dalam upaya peningkatan pembangunan dan perkembangan ekonomi desa.

Desa Jangkang Dua sendiri dalam melaksanakan musyawarah pembangunan tingkat partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan kehadirannya masih sangat rendah, hal ini disebabkan. Pertama, tidak terjalannya komunikasi yang baik antara Kepala Desa dengan masyarakat. Dalam hal ini belum mampu memanfaatkan forum diskusi dengan masyarakat untuk menyampaikan informasi serta mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang dibuat oleh pemerintah desa juga masih minim. Kedua, masih terdapat adanya program kegiatan pembangunan yang belum terealisasi, dalam pelaksanaannya tidak terealisasi. Hal tersebut terlihat dari tidak terealisasinya perencanaan yang dibuat dengan pelaksanaannya, serta kurangnya Kepala Desa bersosialisasi secara langsung dengan masyarakat sehingga Kepala Desa kurang memahami permasalahan yang sebenarnya dihadapi masyarakat. Ketiga, masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan musrenbang-desa. Selanjutnya, terdapat organisasi kemasyarakatan dan kelompok-kelompok masyarakat yang tidak aktif dan tidak diberi arahan dan bimbingan untuk mereka berkembang, rendahnya partisipasi masyarakat serta rendahnya rasa kepedulian masyarakat

terhadap pembangunan desa menganggap pembangunan itu merupakan tanggung jawab pemerintah juga menambahkan permasalahan ini semakin rumit. Padahal seharusnya dalam pembangunan masyarakat lebih banyak menyertakan untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan pembangunan yang dibuat pemerintah desa. Selanjutnya untuk mengetahui Daftar Kehadiran Peserta Musrenbang-Desa, di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini.

Tabel 1.1
Daftar Kehadiran Peserta Musrenbang-Desa, di Desa Jangkang Dua
Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya

NO	NAMA	JABATAN	ABSEN
I	II	III	IV
1	Hamdani	Kepala Desa	Hadir
2	Joni Anggara	Ketua BPD	Hadir
3	Ari Purwanto	Staff Desa	Hadir
4	Rahmat	Rt 003/001	Hadir
5	Mulyoto	Rw 001	Hadir
6	Kasiman	Rt 006/003	Hadir
7	Susana	Kader	Hadir
8	Yarno	Rt 005/002	Hadir
9	Supriadi	Rt 001/001	Hadir
10	Wasilatun N. H	Anggota BPD	Hadir
11	Nifebri Yenti	Anggota BPD	Hadir
12	Nofi Herfianto	Kadus Purworejo	Hadir
13	Haruna	Kadus Sumber Karya	Hadir
14	Marsudiono	Masyarakat	Hadir
15	Iswanto	LPM	Hadir
16	Rudi Suyatno	Rt 002/001	Hadir
17	Saryita	Masyarakat	Hadir
18	Agus Heriyanto	Rt 14	Hadir
19	Eka Sionco	Masyarakat	Hadir
20	S. Baskoro	BPD	Hadir
21	Joko Untoro	Masyarakat	Hadir
22	M. Rifai	Rw 002	Hadir
23	Laila	PKK	Hadir
24	M. Jais	Rt 007/003	Hadir
25	Paiman	Masyarakat	Hadir
26	Misnawati	KPM	Hadir

I	II	III	IV
27	Jumiran	Rt 10	Hadir
28	Tulus Budiyono	Rt 004/002	Hadir
29	Iqbal Ajis	Kadus Sidodadi	Hadir
30	Mistriana	Staff Desa	Hadir
31	Jumadi	Kadus Bumi Harapan	Hadir
32	Putra Hamka	Staff Desa	Hadir
33	Patmayanti	Staff Desa	Hadir
34	Surati	Kader	Hadir
35	Budi	Babinsa	hadir

Sumber : Kantor Desa Jangkang Dua, Januari 2024

Berdasarkan daftar tabel 1.1 di atas, menunjukkan bahwa pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbang-desa) yang dilaksanakan di Balai Desa Jangkang Dua, dapat dilihat partisipasi masyarakat di desa tergolong rendah, ini terlihat dari tabel di atas, yang hadir hanya perangkat desa, BPD, Kepala Dusun, LPM, Kader, PKK, dan Ketua RT, namun untuk Ketua RT tidak semua RT yang bisa hadir, sedangkan masyarakat hanya beberapa orang saja. Jadi ketika pelaksanaan musrenbang-desa di balai desa semua yang hadir termasuk Kepala Desa, BPD, Kepala Dusun, LPM, Kader, PKK, dan Ketua RT serta masyarakat semuanya berjumlah 35 orang, dari jumlah 35 orang tersebut masyarakat yang hadir hanya berjumlah 5 orang saja, selebihnya pemerintah desa dan tamu undangan dari Kecamatan.

Desa Jangkang Dua memiliki 4 Dusun, 20 RT. Melihat jumlah masyarakat yang begitu banyak di Desa Jangkang Dua dan melihat data absensi kehadiran dalam musrenbang-desa tingkat partisipasi masyarakat tergolong rendah. Selanjutnya untuk mengetahui Rencana Kerja Pembangunan Desa Jangkang Dua, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Rencana Kerja Pembangunan Desa Jangkang Dua
Tahun 2023

No	Bidang	Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran	Waktu	Biaya
1	Pembangunan Desa	1.Dukungan penyelenggaraan PAUD	Desa	1 Paket	Anak Paud	Agustus	Rp 15.020.000
		2.Penyelenggaraan posyandu kencur Arum	Desa	12 kali	Bayi dan Balita	Januari s/d Desember	Rp 25.539.000
		3.Posyandu Melati Putih	Dusun Purworejo	12 kali	Bayi dan Balita	Januari s/d Desember	Rp 19.969.000
		4.Posyandu Lansia Mawar	Dusun Bumi Harapan	12 kali	Usia Lanjut	Januari s/d Desember	Rp 24.955.500
		5.Posyandu Lansia Harapan	Dusun Purworejo	12 kali	Usia Lanjut	Januari s/d Desember	Rp 23.275.500
		6. Pencegahan Stunting	Desa	12 kali	Bayi dan Balita	Januari s/d Desember	Rp 21.069.000
		7.Pelatihan Kader Kesehatan/Kader Posyandu dan KPM	Desa	1 Kali	Kader Kesehatan	Juni	Rp 2.945.000
		8.Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan (Ambulan Desa)	Desa	12 Bulan	Pasien	Januari s/d Desember	Rp 24.168.000
		9.Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Desa	12 Kali	Bayi dan Balita	Januari s/d Desember	Rp 30.660.000
		10. Pengadaan alat bantu disabilitas /penyangdang cacat	Desa	1 Paket	Penyangdang cacat/disabilitas	September	Rp 7.744.400
		11.Pemeliharaan Jalan Desa	Desa	15.000 m	Semua warga	Januari s/d Desember	Rp 2.660.000
		12.Pembangunan Jalan Rabat Beton	TR 26 A Dusun Sidodadi	200 x 1,5 x 0,15 m	Warga Dusun Sidodadi	Juli	Rp 81.956.450
		13.pemeliharaan Lokasi Pemakaman Desa	Dusun Sumber Karya	20.000 M2	Semua warga	Januari s/d Desember	Rp 1.768.000
		14.Rehabilitasi Sekretariat BPD	Dusun Purworejo	6 x 6 meter	Anggota BPD	Maret	Rp 4.392.000
		15.Peningkatan pemakaman milik Desa (Pembuatan Jalan Pemakaman)	Dusun Sumber Karya	143 x 1,5 meter	Semua warga	Januari dan September	Rp 93.705.150
		16.Pemeliharaan saluran Pemukiman (Paret Tersiyer)	Desa		Semua warga	September	Rp 118.969.350
Jumlah Per Bidang							Rp 498.769.350

Sumber : Kantor Desa Jangkang Dua, Januari 2024

Berdasarkan data dari tabel 1.2 tersebut terlihat sangat jelas bahwa rencana pembangunan di Desa Jangkang Dua telah dilakukan hanya saja yang telah dianggarkan dan yang direncanakan dalam pelaksanaannya bisa saja berbeda. Rencana Kerja Pembangunan Desa di Desa Jangkang Dua tersebut perlu disusun guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam pembangunan desa, pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya desa dengan melakukan perubahan ke arah perbaikan selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan. Perubahan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang terus berkembang dimasyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki di desa, sehingga tidak tertutup kemungkinan dilakukan perubahan secara terus menerus dalam kurun waktu tertentu dengan tahapan-tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, demi mencapai kesejahteraan dan kemandirian serta untuk mencapai visi dan misi Desa Jangkang Dua.

Desa Jangkang Dua merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya. Sebagian besar penduduk yang ada di Desa Jangkang adalah bekerja sebagai petani sawah dan berkebun, dan lain sebagainya. Heterogenya masyarakat di Desa Jagkang Dua perlu didorong dengan pemberdayaan masyarakatnya baik dalam kelompok atau komunitas yang produktif, perlu bagi desa untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia ini melalui pembinaan kelompok lembaga organisasi yang telah ada, dalam perkembangannya Desa Jangkang Dua tumbuh dan berkembang menjadi lebih baik, namun tidak terlepas dari itu, permasalahan yang terjadi yaitu tidak mampu bergerak suatu organiasi. Oleh karena itu, sangat perlu perhatian dari pemerintah desa untuk segera mengatasi masalah ini, berikut ini adalah

beberapa kelompok organisasi kemasyarakatan yang ada di Desa Jangkang Dua. Selanjutnya untuk mengetahui data kelembagaan Desa Jangkang Dua, dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini.

Tabel 1.3
Data kelembagaan Desa Jangkang Dua
Tahun 2023

No	Jenis Kelembagaan	Jumlah
1	LPMD	5 Orang
2	Kelompok Tani	48 Orang
3	Linmas Desa	8 Orang
4	PKK	35 Orang
5	BUMDES	6 Orang
6	Karang Taruna	9 Orang

Sumber : Kantor Desa Jangkang Dua, Januari 2024

Berdasarkan dari tabel di atas menunjukkan bahwa dalam meningkatkan produktivitas SDM masyarakat diperlukan usaha dan keseriusan pemerintah untuk mendorong kelompok masyarakat untuk aktif dalam pembangunan, namun terlihat bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang sudah terbentuk tetapi tidak dapat berjalan dengan baik, hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah desa Jangkang Dua untuk melakukan evaluasi dan mencari solusi agar nantinya kelompok-kelompok yang sudah tidak aktif dapat hidup kembali dan mendorong pembangunan Desa Jangkang Dua semakin berkembang.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan pembahasan lebih lanjut untuk menemukan aspek-aspek yang terkait dengan peran pemimpin dan juga partisipasi masyarakat dalam judul “Peran Kepemimpinan Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi

Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan di Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya komunikasi yang baik antara kepala desa dengan masyarakat terkait perencanaan pembangunan atau musrenbang-desa.
2. Masih terdapat adanya program kegiatan pembangunan yang belum terealisasi.
3. Masih minimnya tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti pelaksanaan musrenbang-desa.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, fokus penelitian ini adalah Peran Kepemimpinan Kepala Desa sebagai penentu arah, komunikator, dan integrator kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Kepemimpinan Kepala Desa sebagai penentu arah, komunikator, dan integrator kepada masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dalam musyawarah perencanaan dan pembangunan, di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peran Kepemimpinan Kepala Desa sebagai penentu arah, komunikator, dan integrator dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Musrenbang Desa, di Desa Jangkang Dua, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu Raya.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dibagi atas dua bentuk yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis :

- 1) Manfaat teoritis yaitu untuk dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan, pengalaman dalam bidang ilmu pemerintahan, khususnya dalam peran kepemimpinan kepala desa dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
- 2) Manfaat Praktis antara lain ; Bagi Kepala Desa, dapat menjadi masukan dan menambah pemahaman kepala desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang desa di Desa Jangkang Dua. Bagi Instansi Desa, dapat menjadi pedoman atau masukan bagi pemerintah Desa Jangkang Dua Kecamatan Kubu Kabupaten Kubu Raya dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musrenbang. Sehingga nantinya dapat mampu meningkatkan partisipasi masyarakat. Bagi Masyarakat, dapat menambah pemahaman masyarakat akan pentingnya kesadaran berpartisipasi dalam musrenbang desa. Bagi Penulis, dapat menambah pemahaman dan wawasan dalam bidang ilmu pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan musrenbang desa.